**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REMISI DALAM SISTEM
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(STUDI PENELITIAN LAPAS BARELANG KELAS II A KOTA BATAM)**

Diva Widiana¹, Christiani Prasetyasari², Siti Nurkhotijah³, Tirsya Ei's Nuryanti⁴

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: 31120027@univbatam.ac.id; christiani.prasetyasari@gmail.com;

sitinurkhotijah@univbatam.ac.id; tirsyaeisnuryanti954@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*mortgage rights, land
and guarantee*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

This research is intended to find out how the legal arrangements for implementing remissions are in the Correctional Institution development system for inmates at the batam class IIA Correctional Institution. The aim of coaching must be based on a corectional syatem which aims to ensure that correctional inmates realize their mistakes, improve themselves and no longer repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, an can live a normal life as good and good citizens. Responsible as stated in article 2 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study uses normative juridical and empirical juridical approaches. In conducting normative research, the researcher conducted a study of statutory regulations and legal materials related to the thesis. In conducting empirical research, it was carried out to obtain primary data, namely by conducting interviews with correctional officers who are considered knowledgable or competent at the Batan Class IIA Correctional Institution. The results of the research show that the in correctional institution's development system for criminals at the Batam Class IIA Correctional Institution is in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Correctional Inmates. It's Just that the implementation has not been carried out optimally due to several reasons namely: Inconsistent implementation of existing rules in the field, time, lack, of expert staff from officers, an unsustainable system, limited skilled staff for inmates, and lack of cooperation from inmates. For this reason, it is hoped that the government needs to update the existing rules, both

laws and government regulations, by adding things that have not been regulated so that the implementation of coaching can run well.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan remisi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Tujuan dari pembinaan harus didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melakukan penelitian normatif, peneliti melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi, dalam melakukan penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang dianggap tahu atau yang berkompeten di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan ada pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Tidak konsistennya pelaksanaan aturan yang ada dilapangan, waktu, kurangnya tenaga ahli dari petugas, sistem yang tidak berkelanjutan, terbatasnya tenaga terampil warga binaan, dan kurangnya kerja sama dari warga binaan. Untuk itu diharapkan agar pemerintah perlu memperbarui lagi aturan aturan yang ada, baik undang undang maupun peraturan pemerintah dengan menambah hal-hal yang belum diatur supaya pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pembinaan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Suka cita dan keceriaan tergambar di wajah-wajah warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Hal ini karena pada 17 Agustus pemerintah memberikan remisi atau pengurangan masa pidana. Pengurangan masa pidana setelah mendapat remisi akan berakibat masa pidana WBP berkurang dan mempercepat proses pembebasan. Setiap tahun WBP diberikan pengurangan masa pidana oleh pemerintah. Pemasyarakatan adalah suatu proses, yaitu proses di mana sih WBP pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu. Hakikat sistem peradilan pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan hukum yang bersifat instan nasional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah, artinya remisi adalah hadiah dari pemerintah kepada WBP. Dalam sistem baru pembinaan WBP, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebagai lembaga pembinaan

posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang biasa dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang biasanya dikenal dengan sebutan pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap WBP dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, yang mana dimaksud orang tersebut masih berada dalam Proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pidanaan searah dengan filosofi Reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (Reintegrasi).

Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Kemudian antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia atau antara harapan dengan capaian atau singkatannya antara *das sollen* dengan *das sein*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat menarik pokok permasalahan yang akan kaji dan di analisa, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan remisi dalam sistem pembinaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan?
- b. Bagaimana implementasi faktor kendala dan solusi pelaksanaan remisi dalam sistem pembinaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu rangka tertentu. Dari uraian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1) Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

2). Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian lapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Didalam prosedur pengambilan data dan pengumpulan data, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, dalam hal ini penulis melakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan, dalam hal ini penulis melakukan dengan cara observasi dan wawancara, observasi dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan dilokasi penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses Tanya jawab secara langsung kepada responden.

Analisis Data

Pada bagian ini telah di uraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis descriptive, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori Ralph Larossa dan Ronand C Reitzes Mengenai cara manusia berperilaku atau berinteraksi yang mana teori ini mengatakan bahwa interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi bagaimana manusia bersama orang lain menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Pada middle theory Penulis menggunakan theory menurut Chinn dan Khamer teori ini menjelaskan bahwa suatu bidang yang relatif luas dari suatu fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan. Selanjutnya applied theory penulis menggunakan teori menurut Soesantari yang menjelaskan tentang bagaimana indikator yang akan memberikan gambaran untuk sebuah konsep.

Lembaga atau institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat, norma dan tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur. Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) warga binaan pemasyarakatan ke dalam masyarakat, ini merupakan landasan filosofi sistem pemasyarakatan.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Remisi Dalam Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

Menurut pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dalam Pembinaan adalah, Kegiatan yang diselenggarakan untuk kegiatan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana, Warga Binaan dan atau anak binaan. Berdasarkan ketentuan pasal 35 sampai dengan pasal 42 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan disebut pula mengenai pembinaan dengan penjelasan pasal sebagai berikut:

Pasal 35 pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh lapas pasal 36 penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).

Pasal 37 untuk kepentingan keamanan, pembinaan, dan atau keperluan proses peradilan, narapidana dapat dipindahkan.

Pasal 38 berdasarkan hasil ilitmas, narapidana diberikan pembimbing.

Pasal 39 pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38B dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 40 dalam menjalankan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, kepala lapas dapat dibantu oleh wali pemasyarakatan.

Pasal 41 ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan narapidana diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 42 Ketentuan mengenai pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 berlaku juga terhadap pelaku dan menjalani pidana tertutup.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi Warga Binaan. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau pimpinan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan itu adalah membina warga binaan dalam usaha perbaikan terhadap tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan perseorangan atau cara mau menolong seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat. Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Pasal 1 Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang

menyelenggarakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Pasal 2 Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi kemasyarakatan secara terpadu.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Agus Sujatno berpendapat bahwasanya membina berarti meningkatkan dan ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan, pengalaman, latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Pola pembinaan warga binaan merupakan suatu cara perlakuan terhadap warga binaan yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar

sekembalinya warga binaan dapat berlaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan warga binaan juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus terpidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti warga binaan, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang ber pribadi luhur dan bermoral tinggi, pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar tidak pidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan rapi dan harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi warga binaan agar jangan sampai mengulang kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara warga binaan dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Implementasi, Kendala dan Solusi Pelaksanaan Remisi Dalam Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

Adapun hambatan maupun kesulitan yang timbul di dalam pelaksanaan remisi dalam sistem pembinaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah:

- a. Tidak konsistennya pelaksanaan aturan yang ada di lapangan.
- b. Waktu
- c. Kurangnya tenaga ahli dari petugas
- d. Sistem yang tidak berkelanjutan.

Berikut adapun yang dapat dijadikan sebagai suatu data perbandingan dari perubahan kebijakan di atas adalah:

- a. Terlaksananya Program Re-Integrasi
- b. Terlaksananya Program Re-Edukasi
- c. Terlaksananya Program Re-Sosialisasi
- d. Terlaksananya Program Kesehatan Dan Perawatan
- e. Terlaksananya Program Laporan Kerja Seksi Binadik

Selain itu setiap penjaga di lembaga pemasyarakatan Barelang di Batam, Kepulauan Riau harus mengawasi hingga 325 orang warga binaan. Kondisi itu salah satu dampak kelebihan kapasitas yang setara 300% daya Tampung asli penjara. Kepala lembaga pemasyarakatan Barelang mengatakan penghuni LP Barelang tercatat 1366 orang. Di mana seharusnya, LP tersebut dirancang hanya untuk dihuni oleh 450 orang saja untuk setiap giliran jaga hanya ada enam petugas dan setiap regu

penjaga terdiri dari seorang komandan regu yang bertugas di depan. Seorang pengawas diblok wanita yang dihuni 60 orang, sisa empat penjaga lain Bertugas di blok pria yang dimiliki rata-rata 1300 orang sejak beberapa bulan terakhir. Hingga 70% merupakan terpidana kasus narkoba. Petugas jaga tidak bisa ditambah karena memang tidak ada tenaga lain.

Pada saat penulis melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam, kegiatan pembinaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun masih kurangnya minat Warga binaan untuk bekerja sama dalam hal pembinaan, di sini masih ditemukan banyak nya warga binaan yang malas untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Faktor faktor yang membuatnya lebih dan kurang berminat untuk menjalin kerja sama

dengan petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam dikarenakan beberapa hal antara lain kurangnya kok operatif dan dalam ikut pembinaan terkesan hanya sebatas ingin keluar dari blok Hunian sehingga pembinaan hanya sebagai formalitas saja.

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A batang, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri. Mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bakal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para warga binaan dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum dalam pelaksanaan sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam berpedoman pada undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di mana undang undang tersebut menyatakan bahwa pembinaan dapat bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pembinaan juga warga binaan pemasyarakatan harus menjalani beberapa tahapan serta berfokus pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

2. Faktor yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam yaitu tidak konsistennya pelaksanaan aturan yang ada di

lapangan, waktu, kurangnya tenaga ahli dari petugas, sistem yang tidak berkelanjutan, terbatasnya tenaga terampil warga binaan, dan kurangnya kerja sama dari narapidana.

SARAN

1. Agar pengaturan hukum terhadap pelaksanaan pembinaan berjalan dengan baik, maka pemerintah perlu memperbaharui lagi aturan-aturan yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dengan menambah hal-hal yang belum diatur supaya pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.
2. Agar petugas pelaksana pembinaan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan menjadi lebih baik dan profesional lagi, supaya pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkhadir, Muhammad, 2014 "Hukum dan Penelitian Hukum", Pt. Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Amin, M, Amrullah. "Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi",

Asikin, Zainal, Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Ed. 1, Cet. 5,

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam

Hadi Suwanto, Sogol, 2013, *Most Inspiring People: Menimba Semangat Dari Orang-orang Hebat Jakarta*. C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1995.

Hamzah, A, 1993, *Hukum pidana yang berkaitan dengan computer*, Jakarta.

Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1995.

Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni Bandung 2014

Kartodihardejo, H, 2017, *Di balik krisis ekosistem : Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta.

Koesnoen, A, 1961, *Politik Pendjara Nasional*, Bandung.

Malhotra, 2003, *Marketing Research: An Applied Approach*, Harlow.

Malhotra, 2003, *Marketing Research: An Applied Approach*, Harlow.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Rineka Citra.

Manroe Max, *Pengertian Lembaga, dan Kelembagaan, Perbedaanannya dengan Organisasi dan contoh Lembaga*.

Miftah Thoha, 1989, *Pembinaan Organisasi*. Jakarta.

Mischel, 2006, *Applying meta-theory to achive generalizability and*

- precision in personality science dalam Applied Psychology: An International Review.*
- Petrus, 1995, dan Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan daalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prayitno, 2005, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan,* Jakarta.
- Purnomo, B, 1982, *Asas Hukum-Hukum Pidana,* Jakarta.
- Purnomo, B, 1986, *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan,* Jakarta.
- Rajawali Pers, 2016, Jakarta.
- Romli admasasmita, 1982, *strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia,* Bandung.
- Rumengan, Jemmy & Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Perdana Mulia Sarana,* Bandung.
- Samosir, D, 1992, *Fungsi pidana penjara dalam sistem Pembinaan di Indonesia* Bandung.
- Simanjuntak, S, 2013, Smart Pustaka.
- Simanjuntak, S. 2013, *buku modul mata kuliah akademi ilmu pemasyarakatan: politik pemasyarakatan.* Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Sirait, A, 1988, *Inti Sari Manejemen Keuangan.* Jakarta.
- Soedejono dirdejo sisworo, 1984, *Filsafat Peradilan dan Perbandingan Hukum,* Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- Soekanto, Soerjono, 2012 “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesantari, 1995, *Sikap Dosen FISIP Universitas Airlangga Terhadap Fasilitas dan Layanan Perpustakaan Universitas Airlangga.* Tesis S2, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia.
- Sudaryono, 2015, “Metode Penelitian Pendidikan”, Pranada Media.
- Sujatno, A, 2006, *Pencerahan dibalik penjara menuju kedamaian*
- Sujatno, A, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri).* Jakarta: Direktorat Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Sujatno, A, 1996, *Psikologi Perkembangan,* Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, “*Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*”, Ed, 1, Cet. 2, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Surayin, 2001, kamus umum bahasa Indonesia, analisis, Yatama Widya, Bandung.

Wijaya, A, 2011, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang UU Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.-PR.07.03.1989 tentang Kapan Rumah Tahanan di Bangun.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Internet dan Website

Agung Pambudi, Pengaruh Sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), Diponegoro Law Journal (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12570>), diakses pada 28 Mei 2024, Pukul 22.15 WIB).

Andri Rinanda Ilham, Sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, <https://Journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924> diakses 28 Mei 2024, Pukul 20:42 WIB).

- Gudang Kumpulan Makalah Defenisi Tujuan Menurut Para Ahli, “<http://makalah-makalah-makalah.blogspot.com/2016/03/defenisi-tujuan-menurut-para-ahli.html>”, diakses pada tanggal 3 Juni 2024
- <http://caterpillanfingert.blogspot.com/2016/10/kajian-teori-dalam-penelitian.html>, diakses 30 Mei 2024
- <http://diannovitamisi.blogspot.com/2016/04/materi-grand-theory-middle-range-theory.html>, diakses 30 Mei 2024
- <http://lapasbarelangbatam.blogspot.com/> diakses 28 Juni 2024
- http://lapasbarelangbatam.blogspot.com/p/sejarah_12.html, diakses 10 Juni 2024
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/1t4b22ef6f9658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas> diakses tanggal 10 Juni 2024
- <http://novitaadadisini.blogspot.com/2011/01/pengertian-kerangka-teori-dan-konsep.html>, diakses 30 Mei 2024
- <http://thesis.binus.ac.id/doc/bab2/2012-1-00468-mm%20bab%202.pdf>, diakses 30 Mei 2024
- <http://www.materibelajar.id/2016/05/Pengertian-teori-dan-konsep-menurut.html>, diakses 30 Mei 2024
- <https://bphn.go.id/berita-utama/remisi-atau-pengurangan-masa-pidana-merupakan-hak-dari-setiap-terpidana-6509>, diakses pada tanggal 27-04-2024, pukul 16:01.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 10 Juni 2024
- <https://id.wikipedia.org/wiki/narapidana>, diakses pada 10 juni 2024
- <https://magisterakutansi.blogspot.com/2015/08/grand-theory.html>, diakses pada 30 Mei 2024
- https://search.app/?link=https%3A2F%2Fnews%2Eetik%2ecom%2Fberita%2FD%2D6868443%2Fapa%2Ditu%2Dremisi%2Dsimak%2Dpengertian%2Djenis%2Ddan%2Dsyarat%2Dsyaratnya%2F&utm_source=igadl%2Cigatpd1%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F%2E. Diakses pada 10 juni 2024
- https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Lapas_50815_tiom__edunitas.html, diakses pada tanggal 27-04-2024, pukul 15:27.
- <https://www.kompasiana.com/seiffu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori>, diakses 30 Mei 2024
- <https://www.maxmanroe/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>, diakses pada 10 Juni 2024
- <https://www.scrib.com/doc/11/0860/622/Kerangka-Kerja-Teoritis-konsep-dan-variabel>, diakses 10 Juni 2024
- <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangkakonseptual/>, diakses 10 juni 2024

- Islamil Rumadan, *Penegakan Hukum Pidana Illegal logging*. Jakarta 2013, Hal.17.
- KBBI *Offline*, Versi 1.5.1
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 2. M. 02/PK04.10 Tahun 1990 tentang Pola Narapidana/Tahanan/bab 3
- Kumpulan Artikel News, Pengertian dan Fungsi Pembinaan Menurut Para Ahli, <http://Xenma.blogspot.com/2014/05/Pengertian-Fungsi-Pembinaan-menurut.html>, diakses pada 3 Juni 2024
- Kumpulan Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli, <http://www.infodanpengertian.com/pengertian-pembinaan-para-ahl>. Diakses 10 Juni 2024
- Wikipedia Indonesia, sistem, “<https://id.wikipedia.org/wiki/sistem>”, diakses pada 3 Juni 2024.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.

- Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadrijani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(3)*, 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(3)*, 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(1)*, 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(2)*, 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(2)*, 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(2)*, 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal, 5(3)*, 140-151.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.
- Rizki, E. F., Fadrijani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(3)*, 92-109.

- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetiasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.